

## Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II\*)

Abdul Hakim\*\*)

### Abstrak

*Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995). Diantara berbagai kendala yang ada, faktor kemampuan aparatur pemerintah dianggap merupakan kendala utama dan bersifat substansial, yaitu merupakan tumpuan bagi kendala-kendala yang lain. Mengingat posisi penting faktor sumber daya manusia (aparatur pemerintah daerah) ini, maka penelitian akan dipusatkan pada dinamika (perubahan) kinerja aparatur pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah tersebut.*

*Bertumpu pada masalah utama tersebut, makalah ini bermaksud mengamati pengaruh uji-coba pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman terhadap kinerja aparatur pemerintahannya. Kinerja aparatur pemerintah daerah akan didekati dengan kriteria efisiensi dan efektifitas aparatur tersebut, sedang alat analisisnya bertumpu pada analisis Likert (Method of Summated Ratings).*

*Hasil studi menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, yaitu pelaksanaan otonomi daerah sebagai variabel bebas dan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel tak bebas. Pengujian terhadap sejumlah sampel yang diambil memberikan hasil seperti yang diharapkan, yaitu uji-coba pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sleman.*

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebenarnya pemerintah telah menyadari pentingnya peran daerah (dengan demikian, juga otonomi daerah) dalam pembangunan

nasional. Meskipun demikian, sampai dengan dilaksanakannya uji coba otonomi daerah di 26 daerah tingkat II di seluruh Indonesia pada tanggal 25 April 1995, masalah ini kurang mendapat perhatian serius. Di samping itu, pemerintah daerah

\*) Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi penulis dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1996.

\*\*) Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

dianggap belum mampu dan belum punya biaya untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah memulai langkah untuk secara berencana dan bertahap menyerahkan berbagai urusan pemerintahan yang selama ini ditangani langsung oleh instansi-instansi pemerintah pusat kepada daerah otonomi (pemerintah daerah tingkat II). Bersamaan dengan itu jajaran pemerintah pusat juga akan dapat mencurahkan perhatian pada tugas-tugas yang lebih strategis.

Penyerahan urusan pemerintahan ini bukan hanya berupa penyerahan tugas-tugas dan tanggung jawab, tetapi juga mencakup personil, peralatan, dan penganggaran. Dengan adanya penyerahan tugas-tugas dan tanggung jawab baru tersebut pemerintah daerah tingkat II dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Jika selama ini pemerintah daerah tingkat II belum dianggap mempunyai kemampuan yang memadai untuk membina dirinya sendiri, maka kelemahan itu terletak pada bidang manajemen, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Ketiga kelemahan ini sebenarnya bertumpu pada satu masalah pokok yaitu lemahnya sumber daya manusia<sup>1)</sup>

Mengingat hal itu maka kinerja sumber daya manusia di daerah tingkat II yaitu aparatur pemerintah daerah tingkat II menjadi penting untuk dianalisis. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagian ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah tersebut.

## STUDI PUSTAKA

### Perkembangan Prinsip dan Tingkatan Otonomi Daerah di Indonesia

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut, perkembangan prinsip dan tingkatan ekonomi pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Prinsip dan Tingkatan Otonomi Berdasarkan UU Pemerintah Daerah yang Berlaku

Undang-undang	Prinsip	Tingkatan
No. 1 tahun 1945	Materiil	3 Tingkatan : a. Bekas Karesidenan b. Kabupaten c. Kota
No. 22 tahun 1954	Formil & Materiil (Riil)	3 Tingkatan : a. Propinsi b. Kabupaten/Kota Besar c. Desa/Kota Kecil
No. 1 tahun 1957	Formil & Materiil (Riil)	3 Tingkatan : a. Propinsi b. Kabupaten/Kota Besar c. Desa/Kota Kecil
No. 18 tahun 1965	Riil Seluas-luasnya	3 Tingkatan : a. Propinsi b. Kabupaten/Kotamadya c. Kecamatan/Kotapraja
No. 5 tahun 1974	Riil Bertanggung	2 Tingkatan : a. Propinsi b. Kabupaten/Kotamadya

Sumber: Dirjen PUOD sebagaimana dikutip oleh Thahja Supriyatna (1993)

1) J. Salusu, (1995). "Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Tingkat II", *Suara Pembaruan*, PT Media Interaksi Utama, Jakarta, 12 Mei.

Prinsip dasar otonomi meliputi yaitu materiil, formil, dan riil (tabel 1) (1) Otonomi materiil berarti terdapat pembagian kewenangan secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah. (2) Otonomi formil berarti tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. (3) Otonomi riil adalah suatu sistem otonomi yang didasarkan pada keadaan, faktor, tindakan, dan kebijaksanaan yang nyata sehingga terdapat harmoni antara tugas dan kemampuan baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah pusat.<sup>2)</sup>

Prinsip-prinsip otonomi yang berlaku di Indonesia mengalami berbagai pergantian dalam kurun waktu tersebut. Setiap kurun waktu mempunyai sifat otonomi tersendiri. Ada kalanya merupakan prinsip asli, seperti pada UU No. 1 Th. 1945, dan ada kalanya merupakan penggabungan lebih dari satu prinsip dasar otonomi, seperti pada UU No. 22 Th. 1954 dan UU No. 1 Th. 1957.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berisi Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, merupakan Undang-undang tentang otonomi daerah yang terakhir, sehingga merupakan Undang-undang yang kita pakai sampai saat ini. Dalam undang-undang tersebut tingkatan daerah otonomi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu propinsi sebagai daerah tingkat I dan kabupaten/kotamadya sebagai daerah tingkat II. Pasal 11 undang-undang ini menegaskan titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II.

Khusus untuk Undang-undang No. 5 Tahun 1974 selain menggunakan prinsip riil (nyata), juga ditambah dengan prinsip bertanggung jawab. *Nyata* berarti otonomi daerah secara nyata diperlukan sesuai

dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. *Bertanggung jawab* mengandung arti pemberian otonomi diselenggarakan dengan upaya memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. *Dinamis* berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.<sup>3)</sup>

### Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk menilai apakah uji coba pelaksanaan otonomi daerah akan berhasil ada beberapa faktor yang harus diperhatikan<sup>4)</sup>, yaitu:

(1) Kemampuan keuangan daerah (2) Kemampuan administrator (3) Keadaan infrastruktur (perlengkapan) daerah (4) Kondisi organisasi pemerintah daerah<sup>5)</sup>

Pelaksanaan uji coba otonomi daerah bukan hanya berupa penyerahan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga mencakup penyerahan personil, peralatan dan penganggaran. Dengan demikian masalah-masalah yang menyangkut ketersediaan personil, keuangan, peralatan dan penganggaran akan terselesaikan jika pemerintah pusat konsisten dalam penyerahan urusan dan kelengkapannya.

2) Tjahja Supriatna, (1993), *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, bab. 1.

3) Mudrajad Kuncoro, (1995) "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Prisma*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 4 April, hal. 4.

4) Proyek Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, (1980) *Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tingkat II*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 96.

5) S. B. Joedono, "Administrasi Pembangunan : Sebuah Pengantar", *Prisma*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, No. 4, tahun 1974, hal. 4.

Dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah setelah adanya otonomi daerah, diperlukan adaptasi bagi para aparat, baik yang diserahkan dari atas maupun pemerintah daerah tingkat II asli.

Ada beberapa pemikiran pokok yang mendasari pendapat bahwa tingkat kemampuan aparatur pemerintah di daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi yang paling penting.

Joedono mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang baru membangun, kebanyakan massa masih tradisional dan unsur-unsur masyarakat modern non pemerintah (golongan swasta dan profesional) masih sedikit jumlahnya. Dalam keadaan demikian, tidak ada jalan lain bagi pimpinan masyarakat-masyarakat negara kecuali menggunakan alat-alat negara sebagai alat-alat utama dalam mengelola atau mengadministrasikan pembangunan. Maka timbullah kesadaran bahwa salah satu faktor utama berhasilnya pembangunan, dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah, adalah faktor kemampuan aparatur pemerintah.<sup>6)</sup>

Dua pemikiran yang lain adalah :

(1) Pada hakikatnya, berhasil atau tidaknya pencapaian suatu tujuan dengan melalui atau menggunakan proses administrasi, dalam hal ini pelaksanaan otonomi, akan tergantung pada manusianya sebagai pelaksana (administrator atau aparat pemerintah). (2) Aparat pemerintah merupakan pelaksana yang harus memperhatikan sampai seberapa jauh keseimbangan di antara birokrasi sebagai wadah pelaksanaan proses administrasi mengadakan hubungan (*total setting*) dengan

lingkungan.<sup>7)</sup>

Dengan pemikiran-pemikiran di muka, akan diteliti seberapa jauh kemampuan para aparat di daerah dalam melaksanakan tugasnya, serta akan dianalisis kemampuan melaksanakan tugas otonomi daerah.

### Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, akan dianalisis dari kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari suatu perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (*ability*), dukungan (*support*) dan usaha (*effort*)<sup>8)</sup>

Saat ini belum ada sistem baku dalam pengukuran kinerja. Untuk itu kinerja dapat diukur dengan kriteria efisiensi dan efektifitas pekerja.<sup>9)</sup>

### Pengertian Efisiensi

Ada beberapa pengertian tentang efisiensi, yaitu efisiensi pada sektor usaha swasta dan efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat.

6) S.B. Joedono, *Op. Cit.*, hal. 4

7) Proyek Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, *opcit.*, hal 150-151.

8) John R. Schormerhorn, (1980), *Management for Productivity*, University of Carbondale, New York, hal 376.

9) T. Hani Handoko, (1989), *Manajemen Personalita dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, BPFE UGM, Yogyakarta, hal. 130.

(1) Efisiensi pada sektor usaha swasta  
(*private sector efficiency*)

Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input-output*, yaitu rasio dari *output* dan *input*.<sup>10</sup> Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisiensi jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) yang minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

(2) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*)

Pengertian efisiensi yang lain suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin.<sup>11</sup> Pada sektor pelayanan masyarakat akan timbul masalah jika diterapkan ukuran efisiensi sebagai rasio dari *output* dan *input*, karena *output* yang dihasilkan dari sektor pelayanan masyarakat sulit diukur. Dengan alasan tersebut, maka efisiensi pelayanan masyarakat yang tidak berorientasi pada laba dianalisis dengan mengukur pengaruh dari faktor-faktor pada sektor tersebut.

Dalam hal ini, efisiensi aparatur pemerintah daerah akan dianalisis dengan mengukur pengaruh faktor-faktor penentu efisiensi aparatur pemerintah daerah tingkat II dengan dilaksanakannya otonomi daerah.

### Pengertian Efektifitas

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi. Pada sektor publik, suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat, yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Mengingat ukuran keberhasilan suatu sasaran pada sektor pelayanan masyarakat sangat sulit diukur, maka efektifitas aparatur pemerintah daerah dianalisis dengan mengukur pengaruh dari faktor-faktor penentu efektifitas aparatur pemerintah daerah sehubungan dengan dilaksanakannya otonomi daerah.

### Faktor-faktor Penentu Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>13</sup> (1) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusiawi seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, dan semangat kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja, serta dana keuangan. (2) Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan dan. (3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. (4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat. (5) Faktor kepemimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha bersama yang berdaya guna (efisien) dan keberhasilan (efektif) mencapai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh aparatur.

10) Johnny Setiawan, (1988), *Pemeriksaan Kinerja (Performance Auditing)*, BPFE UGM, Yogyakarta, hal. 56

11) Soewarno Handoyoningrat, (1995), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 16.

12) *Ibid*, hal. 16

13) S.B. Joedono, *opcit*, hal. 18

## DESKRIPSI DATA DAN METODE ANALISIS DATA

### Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi yang menjadi obyek penelitian adalah seluruh anggota aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sleman (dinas-dinas yang menerima pelimpahan tugas dan instansi yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *disproportionate variable sampling*. Populasi dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu dinas-dinas yang menerima pelimpahan tugas dan instansi-instansi yang diserahkan, kemudian dari dinas-dinas dan instansi-instansi tersebut diambil sejumlah sampel. Untuk mengambil sampel dari kelompok-kelompok tersebut digunakan metode *convenience sampling*, yaitu sampel yang mudah dijumpai.

### Metode Analisis Data

Dalam analisis hubungan antar variabel yang menghubungkan struktur kausal antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, hipotesis diuji secara statistik dengan menggunakan analisis Likert (*method of summated rating*). Analisis Likert terdiri dari tiga tahap sebagai berikut : (1) Penyusunan kuesioner yang relevan terhadap kriteria evaluasi kinerja yang diteliti. Kemudian diadakan pengelompokan jawaban setuju atau tidak dalam empat kwantum psikologis yang diseleksi. Nilai jawaban setiap responden dihitung dengan menjumlahkan bobot yang berhubungan dengan tiap jawaban yang dikehendaki. (2) Dari hasil identifikasi dan tabulasi diadakan tes analisis instrumen atau

analisis butir yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas terhadap pertanyaan yang relevan. (3) Butir-butir pertanyaan yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas digunakan sebagai alat uji untuk tes hipotesis skala Likert.

## PEMBAHASAN

Karena variabel kinerja didekati dengan variabel efisiensi dan variabel efektivitas, maka pada tiap tahap dari analisis Likert ini akan diadakan analisis sekaligus untuk kedua variabel tersebut. Untuk keperluan pengujian, istilah variabel efisiensi dan variabel efektivitas akan diganti dengan istilah kontrak efisiensi dan kontrak efektivitas.

### Penyusunan Kuesioner

Untuk kontrak efisiensi, berhasil disusun 19 butir pertanyaan. Untuk kontrak efektivitas berhasil disusun 17 butir pertanyaan sesuai kriteria yang sama. Setelah disebar kepada responden, didapatkan skor komposit untuk masing-masing kontrak dari tiap responden yang dibobotkan terhadap empat tingkat kwantum psikologis. Tahap berikutnya, skor tersebut digunakan sebagai alat uji efisiensi dan efektivitas untuk setiap kontrak.

### Analisis Validitas dan Reliabilitas

Analisis validitas dan analisis reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan memakai program Seri Program Statistik yang disusun oleh Prof. Dr. Soetrisno Hadi M.A.<sup>14)</sup>

14) Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto, (1991), *Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes, dan Skala Nilai dengan BASICA*, Andi Offset, Yogyakarta.

**Analisis Validitas dan Reliabilitas Konstrak Efisiensi**

**Analisis Validitas Efisiensi**

Derajat bebas (*degree of freedom*) yang digunakan adalah  $N-2$ , dengan  $N$  menunjukkan jumlah sampel yang diambil. Dengan sampel 147 responden maka derajat bebasnya adalah  $147-2=145$ . Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% untuk uji satu ekor. Kaidah uji yang digunakan yaitu:

- $r_{rt}$  part whole correlation positif
- $p$  (peluang ralat)  $< 0,05$

Hasil analisis komputer disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
Rangkuman Analisis Kesahihan Butir Konstrak Efisiensi

Butir no.	$r_{xy}$	$r_{pq}$	$p$	Status
1.	0,948	0,437	0,000	sahih
2.	0,570	0,506	0,000	sahih
3.	0,572	0,508	0,000	sahih
4.	0,631	0,558	0,000	sahih
5.	0,686	0,639	0,000	sahih
6.	0,418	0,349	0,000	sahih
7.	0,610	0,534	0,000	sahih
8.	0,488	0,396	0,000	sahih
10.	0,471	0,366	0,000	sahih
11.	0,698	0,621	0,000	sahih
12.	0,538	0,447	0,000	sahih
13.	0,293	0,208	0,003	sahih
14.	0,583	0,512	0,000	sahih
15.	0,8521	0,445	0,000	sahih
16.	0,656	0,575	0,000	sahih
17.	0,546	0,466	0,000	sahih
18.	0,070	-0,027	0,187	gugur
19.	0,328	0,235	0,001	sahih

Sumber : Pengolahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir pertanyaan nomor 18 gugur. Dengan demikian analisis selanjutnya hanya pada butir-butir nomor 1 sampai 17 dan butir nomor 19, yaitu nomor-nomor untuk butir-butir yang sah.

**Analisis Reliabilitas Konstrak Efisiensi**

Derajat bebas yang digunakan adalah  $N-1$ . Kaidah uji yang digunakan adalah:

- $r_{rt}$  Hoyt Correlation positif
- $p$  (peluang ralat)  $< 0,05$

Butir-butir yang sah, yaitu nomor 1 sampai dengan 17 dan nomor 19 untuk selanjutnya diuji reliabilitasnya

**Tabel 3**  
Rangkuman Analisis Keandalan Butir Konstrak Efisiensi

Sumber	JK	db	RK
Subyek	227,162	146	1,556
Butir	22,282	17	--
Sisa	560,430	2482	0,226
Total	809,773	2646	--
rtt	=0,855	$p = 0,000$	

Sumber : Pengolahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $r_{rt}$  bernilai 0.885, dan peluang ralat ( $p$ ) adalah 0,000. Dengan demikian butir-butir yang sah konstrak efisiensi dinyatakan andal.

**Analisis Validitas dan Reliabilitas Konstrak Fektivitas**

**Analisis Validitas Konstrak Efektivitas**

Derajat bebas yang digunakan adalah  $N-2$ . Kaidah uji yang digunakan yaitu:

- $r_{bt}$  part whole correlation positif
  - p (peluang ralat) < 0,05
- Hasil analisis komputer disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
Rangkuman Analisis Kesahihan Butir  
Konstrak Efektifitas

Butir no.	r xy	r pq	p	Status
1.	0,649	0,563	0,000	sahih
2.	0,685	0,596	0,000	sahih
3.	0,732	0,673	0,000	sahih
4.	0,565	0,500	0,000	sahih
5.	0,472	0,380	0,000	sahih
6.	0,392	0,292	0,000	sahih
7.	0,631	0,561	0,000	sahih
8.	0,406	0,313	0,000	sahih
10.	0,534	0,460	0,000	sahih
11.	0,423	0,327	0,000	sahih
12.	0,600	0,525	0,000	sahih
13.	0,591	0,519	0,003	sahih
14.	0,736	0,670	0,000	sahih
15.	0,5911	0,512	0,000	sahih
16.	0,075	-0,029	0,000	gugur
17.	0,451	0,360	0,000	sahih

Sumber : Pengolahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir pertanyaan nomor 16 gugur. Dengan demikian analisis selanjutnya hanya pada nomor 1 sampai dengan 15 dan nomor 17, yaitu nomor-nomor untuk butir-butir yang sah.

**Uji Reliabilitas (Keandalan) Butir**

Derajat bebas yang digunakan adalah N-1. Dalam kasus ini derajat bebas adalah 147-1=146. Taraf signifikansi adalah 5% untuk satu uji ekor. Kaidah uji yang digunakan adalah :

- $r_{tt}$  Hoyt Correlation positif

- p (peluang ralat) < 0,05
- Butir-butir yang sah, yaitu nomor 1 sampai dengan 15 dan nomor 17 untuk selanjutnya diuji reliabilitasnya. Hasil perhitungan komputer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.15**  
Rangkuman Analisis Keandalan Butir  
Konstrak Efektifitas

Sumber	JK	db	RK
Subyek	222,508	146	1,524
Butir	38,365	15	---
Sisa	476,635	2190	0,218
Total	737,508	2351	--
rtt	=0,857	p =0,000	

Sumber : Pengolahan data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $r_{tt}$  bernilai 0,875, dan peluang ralat (p) adalah 0,000. Dengan demikian butir-butir yang sah konstrak efisiensi dinyatakan andal. Untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan tes hipotesis.

**Tes Hipotesis Skala Likert**

**Tes Hipotesis Skala Likert untuk Konstrak Efisiensi**

**Pendefinisian hipotesis**

HO: Otonomi daerah tidak meningkatkan efisiensi kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman.

H1: Otonomi daerah meningkatkan efisiensi kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman

**Kaidah/syarat**

HO diterima jika total skor komposit < skor batas



HO ditolak jika total skor komposit > skor batas

$$\begin{aligned} \text{Skor min} &= 1 \times k \times n \\ &= 1 \times 18 \times 147 = 2.646 \end{aligned}$$

dimana:

1 = nilai psikologis terendah

k = jumlah butir pertanyaan

n = jumlah responden

$$\begin{aligned} \text{skor maks} &= 4 \times k \times n \\ &= 1 \times 18 \times 147 = 10.548 \end{aligned}$$

dimana:

4 = nilai psikologis tertinggi

k = jumlah butir pertanyaan

n = jumlah responden

$$\begin{aligned} \text{Skor batas} &= \text{skor min} + 1/2 (\text{skor maks} - \text{skor min}) \\ &= 2.646 + 1/2 (10.584 - 2.646) \\ &= 2.646 + 3.969 \\ &= 6.615 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor komposit} &= \sum_{i=1}^n \text{skor individu} \\ &= \sum_{i=1}^{147} \text{skor individu} \\ &= 7.701 \end{aligned}$$

Skor batas kontrak efisiensi = 6.615

Total skor komposit = 7.701

7.701 > 6.615, maka total skor komposit > skor batas

Dengan demikian, didapatkan total skor komposit melebihi skor batasnya, sehingga uji hipotesis ini menolak HO. Jadi pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah daerah.

### Tes Hipotesis Skala Likert untuk Konstrak Efektifitas

#### Pendefinisian hipotesis

HO: Otonomi daerah tidak meningkatkan efektivitas kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman.

H1 : Otonomi daerah meningkatkan efektifitas kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman

#### Kaidah/syarat

HO diterima jika total skor komposit < skor batas

HO ditolak jika skor komposit > skor batas

$$\begin{aligned} \text{Skor min} &= 1 \times k \times n \\ &= 1 \times 18 \times 147 = 2.352 \end{aligned}$$

dimana:

1 = nilai psikologis terendah

k = jumlah butir pertanyaan

n = jumlah responden

$$\begin{aligned} \text{Skor maks} &= 4 \times k \times n \\ &= 4 \times 16 \times 147 = 9.408 \end{aligned}$$

dimana :

4 = nilai psikologis tertinggi

k = jumlah butir pertanyaan

n = jumlah responden

$$\begin{aligned} \text{Skor batas} &= \text{skor min} + 1/2 (\text{skor maks} - \text{skor min}) \\ &= 2.352 + 1/2 (9.408 - 2.352) \\ &= 2.352 + 1/2 (7.056) \\ &= 2.352 + 3.528 \\ &= 5.880 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor komposit} &= \sum_{i=1}^n \text{skor individu} \\ &= \sum_{i=1}^{147} \text{skor individu} \\ &= 7.080 \end{aligned}$$

Skor batas kontrak efektivitas = 5.880

Total skor komposit = 7.080

Dengan demikian didapatkan bahwa total skor komposit melebihi skor batasnya, sehingga uji hipotesis ini menolak HO. Jadi pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan efektivitas aparatur pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Dari analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa. Pelaksanaan uji-coba otonomi daerah yang dilaksanakan di daerah tingkat II Sleman mempengaruhi efisiensi dan efektivitas aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman secara positif. Kinerja aparatur pemerintah daerah tingkat II Sleman menjadi lebih baik dalam arti efisiensi dan efektivitasnya meningkat dengan dilaksanakannya program otonomi daerah. Dengan hasil simpulan ini diharapkan program otonomi daerah yang dilaksanakan di daerah tingkat II Sleman akan berhasil dalam semua segi, karena faktor sumber daya manusia yang merupakan kunci keberhasilan terbukti menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Strisno, (1991), Seno Pamardiyanto, *Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes, dan Skala Nilai dengan BASICA*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Handoyoningrat, Soewandi, (1995), *Pengantar Studi Ilmu Admininstrasi dan Manajemen*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Hani Handoko, T., (1989), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Joedono, S.B., (1974 no 4), *Administrasi Pembangunan: Sebuah Pengantar*, Prisma, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Kuntjoro, Mudrajat, (4 April 1995), *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Maskun, Sumitro, *Orientasi Daerah adalah Program Pemerintah*, Prisma, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Proyek Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, (1980), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan yang Titik Beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Salusu, (12 Mei 1995), *Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Tingkat II*, Suara Pembaharuan, PT. Media Interaksi Utama, Jakarta.
- Schormerhorn, John R., (1993), *Management for Productivity*, University of Carboudale, New York.
- Setiawan, John, (1989), *Pemeriksaan Kinerja (Performance Auditing)*, BPFE, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahja, (1993), *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.